



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUNARMI
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 472308

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	640.000.000
1. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 563 m2/150 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	356.000.000
1. MOTOR, MIO M3 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, MOBILIO DD4 1,5 E MANUAL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
3. MOTOR, HONDA TRAIL TRAIL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
4. MOBIL, SUZUKI PIC UP SUZUKI/AE/154PC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	27.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.076.000.000

III. HUTANG **Rp.** **455.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **621.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.